

Bedah Rumah Kebon Padangan Diduga Disunat

TABANAN - Bantuan bedah rumah provinsi Bali tahun 2015 di Desa Kebon Padangan, Kecamatan Pupuan diduga disunat oleh oknum perbekel Desa Kebon Padangan, Kecamatan Pupuan. Dana yang dipotong masing-masing mencapai Rp 4,5 juta.

Berdasarkan informasi yang dihimpun *Jawa Pos Radar Bali* di lapangan, awalnya warga Desa Kebon Padangan yang menerima bantuan bedah rumah dari provinsi Bali 2015 masing-masing sebesar Rp 30 juta. Namun setelah dana itu turun, ternyata ada pemotongan dana sebesar Rp 4,5 juta oleh Perbekel Desa Kebon Padangan, I Made Arif Hartawan. "Alasannya adalah untuk biaya administrasi," ungkap sumber yang enggan dikorbankan namanya tersebut.

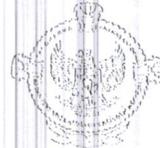
Lebih dijelaskan lagi, pemotongan tersebut dialami oleh tiga warga yang mendapatkan bantuan bedah rumah. Karena merasa ada yang janggal, warga sudah pernah melaporkan hal tersebut, namun hingga saat ini tidak mendapatkan tanggapan.

Terkait hal tersebut, Perbekel Desa Kebon Padangan, I Made Arif Hartawan membantah dengan tegas tuduhan pemotongan bantuan bedah rumah tersebut dan berdalih hanya ada pemotongan pajak. "Tidak ada pemotongan, itu hanya dikenai pajak," bantahnya.

Namun sayangnya, berapa besaran pajak yang dikenakan, calon Perbekel Incumbent yang terpilih kembali tersebut mengaku tidak mengetahui dengan pasti. "Semuanya ada laporannya," ujarnya saat dikonfirmasi via telepon. (ras/gup)

Edisi : Rabu, 11 November 2015

Hal. : 28



Dari "Gunung" Ikut Tolak Reklamasi

BANGLI - Penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa tidak hanya dilakukan warga di pesisir Bali selatan. Bahkan, warga di "gunung" pun yang jauh dari pantai pun turut bersolidaritas, menolak reklamasi tersebut. Adalah LSM Wahana Peduli Lingkungan (Wanapeling) Batur yang melakukan penolakan dengan memasang baliho tolak reklamasi berkedok revitalisasi Teluk Benoa di Pura Batur, Kintamani, Bangli, kemarin (10/11).

Acara yang dimulai sejak pagi itu diikuti oleh puluhan pemuda. Diawali dengan persembahyangan, lalu aksi bersih-bersih pura, dan pemasangan baliho di depan kantor camat. "Hari ini, (kemarin, Red) kami melakukan aksi solidaritas terhadap gerakan yang ada di Bali Selatan untuk menolak reklamasi berkedok revitalisasi Teluk Benoa," ungkap Ketua LSM Wanapeling Batur, Yogi.

Kata Yogi, bentuk solidaritas ini dipandang perlu, mengingat proyek reklamasi seluas 700 hektare ini dilakukan di Teluk Benoa yang awalnya merupakan kawasan konservasi dan juga teluk tersebut merupakan kawasan suci. "Kami tentu sudah pelajari dampaknya, dan yang pal-



SOLIDARITAS: Wanapeling Batur ikut melakukan penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa, kemarin.

ing terpenting kami di Batur ini juga memiliki sebuah danau yang juga memiliki nilai konservasi dan tidak ingin juga suatu saat dieksploitasi," terangnya.

Mereka pun senada dengan gerakan yang selama ini dilakukan sejumlah elemen, di antaranya yang tergabung dalam Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI). Yakni, menuntut Presiden Jokowi agar mencabut Perpres 51 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Sarbagita. "Kami berharap tidak terjadi kerusakan lagi seperti kasus reklamasi di Pulau Serangan, kita harus belajar dari masa lalu," ujarnya.

I Putu Sucipta, sekretaris Wanapeling menyampaikan bahwa Bali

memiliki prinsip nyegara gunung sehingga alam Bali harus dijaga dengan konsep keseimbangan. "Kami dari pegunungan menolak reklamasi berkedok revitalisasi Teluk Benoa, karena proyek reklamasi Teluk Benoa akan memberikan dampak negatif bagi pulau Bali. Kami percaya konsep nyegara gunung sehingga harus menjaga kelestarian gunung dan pesisir di Bali," ujarnya.

"Kami bersih-bersih juga merupakan kerja tulus ikhlas, sekaligus mengingatkan kelompok-kelompok yang sering mengklaim melakukan kegiatan bersih-bersih namun tidak ikhlas karena di balik kegiatannya hanya ingin mereklamasi Teluk Benoa," sindir Yogi. (yor)

Edisi : Rabu, 11 November 2015

Hal. : 28